



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON  
TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaantugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan dasar kepada Masyarakat yang mempunyai asas manfaat tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikandan dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran maka Walikota Ambon memandang perlu menetapkan penggunaan anggaran belanja kegiatan yangdilaksanakan sebelumPenetapanPerubahanAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa sehubungan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon (APBD Perubahan) Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka untuk mendanai belanja dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645 );  
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 );  
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. PeraturanPemerintahNomor 15 Tahun 1955 TentangPembentukanKota Ambon Sebagai Daerah Yang BerhakMengatur Dan MengurusRumahTangganyaSendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- 10.Peraturan PemerintahNomor 13 Tahun 1979 TentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574;
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Hibah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 17; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 317;
22. Peraturan Walikota Ambon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2016

#### Pasal 1

Pengeluaran untuk belanja yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

#### Pasal 2

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana pada pasal 1 merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun Anggaran yang berjalan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

- (2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Selain belanja sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2), beberapa kegiatan yang sangat mendesak sesuai jadwal tidak dapat ditunda pelaksanaannya termasuk kegiatan tahun sebelumnya yang belum diakomodir dalam APBD Tahun 2016 tetapi secara fisik masih dalam pengerjaan.
- (2) Kegiatan - kegiatan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### Pasal 4

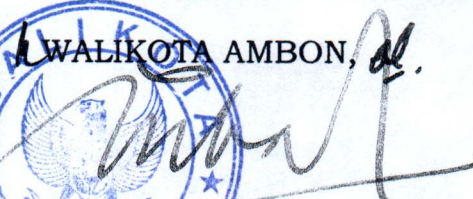
Belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3, dapat dilakukan dengan mempedomani Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang sudah melalui mekanisme pembahasan bersama dan dilakukan secara selektif.

### Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 21 Januari 2016

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU  
BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR 1

**LAMPIRAN**  
**NOMOR**  
**TENTANG**  
**TANGGAL**

: PERATURAN WALIKOTA  
: 1 TAHUN 2016  
: PERUBAHAN PENJABARAN APBD SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2016  
: 21 JANUARI 2016

NO	SKPD	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN				KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG		
<b>PENDAPATAN</b>							
1	PPKD	- SILPA	Rp 16.741.283.285	Rp 32.487.941.213	Rp 15.746.657.928	SILPA	
		- DAK Non Fisik BOK	Rp -	Rp 5.390.000.000	Rp 5.390.000.000	SILPA	
		- DAK Non Fisik Bidang KB	Rp -	Rp 1.152.000.000	Rp 1.152.000.000	SILPA	
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>							
1	KELURAHAN BATU GAJAH	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 93.600.000	Rp 93.600.000	SILPA	
2	KELURAHAN HONIPOPU	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 93.600.000	Rp 93.600.000	SILPA	
3	KELURAHAN PANDAN KASTURI	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 111.600.000	Rp 111.600.000	SILPA	
4	KELURAHAN URITETU	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000	SILPA	
5	KELURAHAN AMANTELU	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 93.600.000	Rp 93.600.000	SILPA	
6	KELURAHAN AHUSEN	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 75.600.000	Rp 75.600.000	SILPA	
7	KELURAHAN BATU MEJA	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 136.800.000	Rp 136.800.000	SILPA	
8	KELURAHAN KARANG PANJANG	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 68.400.000	Rp 68.400.000	SILPA	
9	KELURAHAN RIJALI	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 82.800.000	Rp 82.800.000	SILPA	
10	KELURAHAN WAIHOKA	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 68.400.000	Rp 68.400.000	SILPA	
11	KELURAHAN BENTENG	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 165.600.000	Rp 165.600.000	SILPA	
12	KELURAHAN MANGGA DUA	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	SILPA	
13	KELURAHAN SILALE	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 57.600.000	Rp 57.600.000	SILPA	
14	KELURAHAN WAINITU	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 118.800.000	Rp 118.800.000	SILPA	
15	KELURAHAN KUDAMATI	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000	SILPA	
16	KELURAHAN NUSANIWE	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 108.000.000	Rp 108.000.000	SILPA	
17	KELURAHAN URIMESSING	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 64.800.000	Rp 64.800.000	SILPA	
18	KELURAHAN WAIHAONG	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 64.800.000	Rp 64.800.000	SILPA	
19	KELURAHAN TIHU	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 75.600.000	Rp 75.600.000	SILPA	
20	KELURAHAN LATERI	- Insentif RT/RW	Rp -	Rp 154.800.000	Rp 154.800.000	SILPA	
21	DINAS PENDIDIKAN	- Insentif Guru PAUD	Rp -	Rp 1.152.000.000	Rp 1.152.000.000	DAK Non Fisik	
22	DINAS PERINDAG	- Kekurangan Insentif Pengelolaan Penerimaan Retribusi Tahun 2015	Rp -	Rp 109.664.250	Rp 109.664.250	DAK Non Fisik	
21	PPKD	- DD Desa Urimessing	Rp -	Rp 351.046.935	Rp 351.046.935	SISA DD 2015	
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			<b>Rp -</b>	<b>Rp 3.549.511.185</b>	<b>Rp 3.549.511.185</b>		

NO	SKPD	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>						
1	DINAS PERHUBUNGAN	- Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Zona Selamat Sekolah	Rp -	Rp 196.187.920	Rp 196.187.920	SILPA
		- Pembangunan Terminal Peti Kemas	Rp -	Rp 4.185.582.000	Rp 4.185.582.000	SILPA
		- Pembuatan Fasilitas Areal Perpakiran	Rp -	Rp 360.327.900	Rp 360.327.900	SILPA
			Rp -	Rp 4.742.097.820	Rp 4.742.097.820	
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	- Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rp -	Rp 7.786.065.969	Rp 7.786.065.969	SILPA
3	BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN	- Pengadaan Pakaian Dinas (Penjahitan)	Rp -	Rp 2.274.316.000	Rp 2.274.316.000	SILPA
		- Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Rp 340.000.000	Rp 510.000.000	Rp 170.000.000	SILPA
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rp 499.208.500	Rp 507.008.500	Rp 7.800.000	SILPA
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 749.563.600	Rp 954.263.600	Rp 204.700.000	SILPA
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 70.000.000	Rp 300.000.000	Rp 70.000.000	SILPA
		- Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik	Rp -	Rp 198.000.000	Rp 198.000.000	SILPA
		- Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kantor Penghubung Pemkot	Rp -	Rp 87.750.000	Rp 87.750.000	SILPA
		- Kurjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp 794.400.000	Rp 1.494.385.000	Rp 699.985.000	SILPA
		- Dialog/ Audens Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat Pimpinan Anggota Sosial Kemasyarakatan	Rp 799.999.000	Rp 1.499.965.900	Rp 699.966.900	SILPA
		- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp -	Rp 198.750.000	Rp 198.750.000	SILPA
			Rp 3.253.171.100	Rp 8.024.439.000	Rp 4.611.267.900	
4	DINAS PERINDAG	- Pengadaan Peralatan Kantor Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 48.000.000	Rp 48.000.000	SILPA
		- Pameran Apeksi 2016	Rp -	Rp 258.365.000	Rp 258.365.000	SILPA
		- Pameran Ina Craft	Rp 94.950.000	Rp 141.610.000	Rp 46.660.000	SILPA
		- Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	Rp -	Rp 36.360.000	Rp 36.360.000	SILPA
		- Pengadaan Standar Minimal Kemetrolagian	Rp -	Rp 377.562.500	Rp 377.562.500	SILPA
		- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	Rp -	Rp 30.504.000	Rp 30.504.000	SILPA
			Rp 94.950.000	Rp 892.401.500	Rp 797.451.500	
5	DINAS PU	- Pembangunan Jalan (Infrastruktur Pedesaan)	Rp 25.200.251.285	Rp 25.900.251.285	Rp 700.000.000	DAK
		- Pembangunan Jembatan Lanjutan	Rp -	Rp 1.131.939.000	Rp 1.131.939.000	DAK
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lanjutan	Rp -	Rp 5.354.156.043	Rp 5.354.156.043	DAK
		- Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Rp 8.481.810.889	Rp 9.981.810.889	Rp 1.500.000.000	SILPA
			Rp 33.682.062.174	Rp 42.368.157.217	Rp 8.686.095.043	

NO	SKPD	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG	
6	KECAMATAN SIRIMAU	- Sosialisasi Kantibnas - Renovasi Ruang Kerja dan Ruang Tunggu - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp	Rp 71.050.000	Rp 71.050.000	SILPA
			Rp	Rp 147.654.000	Rp 147.654.000	SILPA
			Rp	Rp 123.147.800	Rp 110.147.800	SILPA
			Rp	Rp 341.851.800	Rp 328.851.800	
8	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	- Sosialisasi Pemberhentian Sementara Proses Suksesi Raja dan Kepala Desa - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah(APEKSI) - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Rangka Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kelurahan Sebagai Basis Penyelenggaraan Pelayanan Publik - Koordinasi Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan - Bimtek Penataan kelembagaan Desa/Negeri dan Sosialisasi Pemendagri No 82,83, & 84 Tahun 2015	Rp	Rp 180.375.450	Rp 180.375.450	SILPA
			Rp	Rp 97.750.000	Rp 97.750.000	SILPA
			Rp	Rp 350.540.000	Rp 350.540.000	SILPA
			Rp	Rp 222.499.450	Rp 222.499.450	SILPA
			Rp	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000	SILPA
			Rp	Rp 55.223.350	Rp 55.223.350	SILPA
			Rp	Rp 1.081.388.250	Rp 1.081.388.250	
			Rp			
			Rp	Rp 276.079.450	Rp 276.079.450	SILPA
			Rp	Rp 5.390.000.000	Rp 5.390.000.000	Dana Non Fisik
10	DINAS KESEHATAN	- Penjarangan dan Penanggulangan Kebutaan - Bantuan Operasional Kesehatan - Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp	Rp 595.100.000	Rp 595.100.000	SILPA
			Rp	Rp 6.261.179.450	Rp 6.261.179.450	
			Rp			
			Rp	Rp 80.721.400	Rp 80.721.400	SILPA
			Rp	Rp 193.031.150	Rp 193.031.150	SILPA
			Rp	Rp 287.765.650	Rp 287.765.650	SILPA
			Rp	Rp 104.791.774	Rp 104.791.774	SILPA
			Rp	Rp 208.524.000	Rp 31.900.600	SILPA
			Rp	Rp 874.833.974	Rp 698.210.574	
			Rp			
			Rp	Rp 135.000.000	Rp 135.000.000	SILPA
11	KANTOR ASET	- Kodifikasi Barang Milik Daerah - Pengamanan Tanah Milik Pemerintah Kota Ambon - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Ambon - Kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan Persediaan dan Aset Lainnya - Penilaian Aset Pemerintah Kota Ambon	Rp	Rp 90.753.150	Rp 90.753.150	SILPA
			Rp	Rp 260.000.000	Rp 80.000.000	SILPA
			Rp	Rp 485.753.150	Rp 305.753.150	
			Rp			
12	INSPEKTORAT KOTA	- Bimbingan Teknis Pengawasan Pemeriksaan Laporan Keuangan (Opini WTP) - Penyelesaian Tuntutan TPTGR - Review Laporan Keuangan	Rp	Rp 176.623.400	Rp 176.623.400	
			Rp			
			Rp			
13	SEKRETARIAT DPRD	- Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan	Rp	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000	
			Rp	Rp 610.113.450	Rp 713.333.179	
			Rp	Rp 489.593.450	Rp 562.113.179	SILPA
			Rp	Rp 120.520.000	Rp 151.220.000	SILPA
14	DINAS PENDIDIKAN	- Monev Kegiatan Study and Work In Japan - Study and Work In Japan	Rp	Rp 176.623.400	Rp 176.623.400	
			Rp	Rp 549.920.000	Rp 549.920.000	SILPA
			Rp	Rp 837.695.000	Rp 837.695.000	SILPA

NO	SKPD	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN				KETERANGAN		
			SEBELUM	SESUDAH		BERTAMBAH/BERKURANG			
				Rp	Rp			Rp	
		- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Kristen Passo (DAK Lanjutan)	Rp	- Rp	365.040.000	Rp	365.040.000	SILPA	
			Rp	- Rp	914.960.000	Rp	914.960.000		
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	- Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota dan Nasional	Rp	143.640.000	Rp	188.975.800	Rp	45.335.800	SILPA
16	DINAS TATA KOTA	- Pengadaan Prasarana dan Sarana Penunjang Keg APEKSI	Rp	- Rp	249.664.000	Rp	249.664.000	SILPA	
		- Pembangunan Gedung Kantor (Bantuan Propinsi)	Rp	- Rp	28.875.000	Rp	28.875.000	SILPA	
		- Pembangunan Jalan Lingkungan dan Bangunan Pelengkap	Rp	- Rp	55.870.500	Rp	55.870.500	SILPA	
		- Pembangunan Talud Penahan Tanah	Rp	- Rp	62.000.000	Rp	62.000.000	SILPA	
		- Pembangunan Gapura dan Running Text	Rp	- Rp	47.570.968	Rp	47.570.968	SILPA	
		- Revitalisasi Pasar Apung Mardika (Tahap II)(lanjutan)	Rp	- Rp	9.075.000	Rp	9.075.000	SILPA	
		- Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) Lanjutan	Rp	- Rp	775.858.791	Rp	775.858.791	SILPA	
		- Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Kota Ambon	Rp	- Rp	147.500.000	Rp	147.500.000	SILPA	
		- Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) Lanjutan	Rp	4.649.640.000	Rp	4.900.046.671	Rp	250.406.671	SILPA
		- Rehabilitas Gedung kantor	Rp	- Rp	284.114.150	Rp	284.114.150	SILPA	
		- Neighbourhood Upgrading and Shelter Project	Rp	- Rp	51.572.800	Rp	51.572.800	SILPA	
		- Pembangunan Pos Jaga Rumah Dinas	Rp	- Rp	221.632.766	Rp	221.632.766	SILPA	
		- Rehabilitasi Kantor Terminal A1 & Terminal A2	Rp	- Rp	449.064.150	Rp	449.064.150	SILPA	
		- Pembuatan Pagar Sementara Pengamanan Lokasi Gedung Christiani Center	Rp	- Rp	171.064.150	Rp	171.064.150	SILPA	
		- Pembuatan Pagar Pembatas Sepanjang Trotoar Pasar Mardika	Rp	- Rp	852.064.150	Rp	852.064.150	SILPA	
		- Sosialisasi IMB	Rp	- Rp	101.572.800	Rp	101.572.800	SILPA	
		- Penataan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Air Besar Negeri Bt Merah	Rp	- Rp	472.413.150	Rp	472.413.150	SILPA	
			Rp	4.649.640.000	Rp	8.879.959.046	Rp	4.230.319.046	
17	BAPPEKOT	- Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2011-2016	Rp	187.039.900	Rp	237.039.900	Rp	50.000.000	SILPA
		- Updeting Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kota (SIMPERKOT) Ambon	Rp	249.820.400	Rp	323.426.300	Rp	73.605.900	SILPA
		- Monitoring,Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan	Rp	147.857.000	Rp	172.567.600	Rp	24.710.600	SILPA
			Rp	584.717.300	Rp	733.033.800	Rp	148.316.500	
18	DINAS KOPERASI	- Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Rp	- Rp	220.000.000	Rp	220.000.000	SILPA	
19	BAGIAN HUMAS	- Pelayanan Kehumasan	Rp	402.210.000	Rp	1.287.680.000	Rp	885.470.000	SILPA
20	SEKRETARIAT KOTA	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp	388.242.000	Rp	409.042.000	Rp	20.800.000	SILPA
21	KPDE	- Pemasangan Peralatan Pendukung TI	Rp	- Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	SILPA	



NO	SKPD	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG	
22	BPPMD	- Pelatihan Sistem Keuangan Desa	Rp -	Rp 129.836.600	Rp 129.836.600	SILPA
23	DINAS PERTANIAN	- Lomba B2SA Tingkat Propinsi	Rp 329.500.000	Rp 412.990.000	Rp 83.490.000	SILPA
24	KANTOR PEMADAM KEBAKARAN	- Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran - Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional	Rp - Rp -	Rp 2.000.000.000 Rp 100.000.000	Rp 2.000.000.000 Rp 100.000.000	Bantuan Khusus Provinsi
			Rp -	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	
		<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	Rp 46.360.624.524	Rp 91.747.860.780	Rp 45.227.236.256	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	Rp 46.360.624.524	Rp 95.297.371.965	Rp 48.776.747.441	
		<b>PERUBAHAN SILPA</b>	Rp 16.741.283.285	Rp 32.487.941.213	Rp 15.746.657.928	

WALIKOTA AMBON *et.*

